

BAKAR RUMAH GURU DI GOME

# KKB Tembaki Kantor Kodim Persiapan

**JAYAPURA (KR)** - Kapolda Papua Iren Pol Mathius Fakhri mengakui adanya laporan terkait kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dari laporan yang diterima terungkap sebelum membakar rumah guru, Selasa (28/3), KKB terlebih dahulu menembaki Kodim Persiapan.

"Tidak ada korban jiwa dalam aksi yang dipimpin Jelek Waker dan Numbuk Telenggen," kata Kapolda Papua di Jayapura, Rabu (29/3).

Fakhri mengakui, akibat maraknya aksi

kekerasan yang dilakukan KKB di beberapa wilayah di Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Tengah, pihaknya senantiasa mengingatkan semua warga agar waspada. Bagi masyarakat yang bermukim di daerah yang masuk kategori rawan diharapkan senantiasa waspada terutama saat beraktivitas di luar rumah. "Warga yang berprofesi sebagai tukang ojek hendaknya waspada dan jangan tergiur ongkos yang ditawarkan untuk mengantar ke wilayah rawan," ujar Fakhri.

Sementara itu terkait kasus penembakan pesawat Trigana, Kabid Humas

Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Prabowo mengatakan, dari laporan yang diterima terungkap tersangka EG merupakan penyuplai bahan makanan kepada anggota KKB yang melakukan penembakan terhadap pesawat Boeing 737-500 milik Trigana tanggal 11 Maret lalu di Dekai.

EG awalnya ditangkap bersama delapan orang lainnya sesaat setelah penembakan pesawat Trigana yang sedang terbang menuju Jayapura. Dari pemeriksaan, delapan warga dipulangkan dan EG ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Mapolres Yahukimo. **(Ant)-f**

KASUS DUGAAN KORUPSI KEMENTERIAN ESDM

# LPSK Buka Perlindungan bagi Saksi

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2020-2022. Terkait hal itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya membuka perlindungan bagi saksi, termasuk saksi pelaku, yang memiliki informasi terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

"Untuk permohonan perlindungan ke LPSK dapat diajukan sendiri oleh yang bersangkutan (saksi), atau direkomendasikan oleh pihak lain, semisal penyidik dalam hal ini KPK yang tengah menyidik dugaan korupsi di ESDM," tutur Hasto di Jakarta, Rabu (29/3).

Diungkapkan, sebagaimana mandat Undang-Undang, LPSK siap memberikan perlindungan bagi saksi maupun saksi pelaku. Tentu dalam hal ini adalah saksi atau pelaku yang mau bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap tuntas dugaan kasus korupsi potongan tunjangan kinerja (tukin) ini.

Hasto menyebutkan, bagi pelaku/tersangka

juga dimungkinkan mendapatkan perlindungan jika yang bersangkutan bersedia menjadi JC atau justice collaborator dengan membantu penyidik memberikan informasi untuk mengungkap modus. "Selain itu untuk menjerat pelaku utama dalam kasus korupsi tukin ini," jelasnya.

Sebenarnya, lanjutnya, di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sudah dibangun mekanisme whistleblowing system (WBS) yang terhubung dengan KPK untuk proses hukumnya, dan LPSK untuk perlindungan terhadap pelapor ataupun saksi. Namun, mekanisme WBS ini seringkali tersendat karena masih adanya keraguan dari pelapor terkait perlindungan terhadap mereka.

Ditegaskan, jika memang mekanisme WBS belum maksimal, LPSK membuka pintu bagi saksi untuk mengajukan perlindungan langsung ke LPSK. "Dalam hal ini banyak media yang bisa digunakan, mulai datang langsung ke LPSK, via aplikasi Perindungan Perlindungan (Android) maupun pesan singkat melalui WhatsApp di 085770010048," tutur Hasto. **(Ful)-f**

## Mahfud

"Saudara ini ada ketentuan di UUD yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut identitas seseorang, nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi terlapor, nilai, tujuan transaksi itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak menyebut apa-apa hanya menyebut angka agregat," papar Mahfud.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut laporan PPATK soal transaksi mencurigakan itu seharusnya tak boleh diumumkan ke publik. Dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kata Arteria, ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan.

"Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (menteri koordinator), ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut," ucap Arteria.

Menurutnya, setiap orang yang melaku-

kan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pada bagian lain, Menko Polhukam Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi penyidikan maupun penegakan hukum, terutama terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

"Saudara jangan gertak-gertak, saya bisa gertak juga. Saudara bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan, penegakan hukum," ujar Mahfud, kemarin.

Mahfud mengungkapkan, kasus serupa pernah terjadi. Pada saat itu pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunandi, berusaha menghalangi penegakan hukum. Mahkamah Agung (MA) lantas memperberat hukuman Fredrich menjadi 7,5 tahun dari 7 tahun.

"Orang mau mengungkap dihantam. Sama seperti saudara kerjanya dengan Fredrich Yunandi melindungi Setya Novanto 'kan tidak boleh, lalu dia melaporkan sembarangan orang. Menghalang-halangi penyidikan, menghalangi pene-

gakan hukum, lalu tangkap. Jadi, jangan main ancam-ancam begitu, kita ini sama," tegasnya.

la mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang menyebutkan, PPATK soal transaksi mencurigakan itu seharusnya tidak boleh diumumkan ke publik. Pasalnya, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan.

"Beranikan Saudara Arteri bilang begitu kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Presiden, bertanggung jawab bukan anak buah Menko Polhukam, melainkan setiap minggu laporan resmi info intelijen kepada Menko Polhukam," paparnya.

Menko Polhukam memiliki hak untuk mengemukakan suatu informasi ke publik. Hal tersebut sudah sering, sehingga, pihaknya mempertanyakan mengapa persoalan ini baru menjadi ramai. **(Ant/Obi)-f**

## Sambungan hal 1

## Kapolres

Polda Jateng. Sementara itu AKBP Muqaromah Fajarini dari Kapolres Kulonprogo dimutasi sebagai Pamen Polda DIY digantikan AKBP Nunuk Setyowati, Kasubdit Binsatpampolsus Polda Jateng.

Pergantian Kapolres Kulonprogo menjadi ramai diperbincangkan setelah adanya insiden penutupan terpal Patung Bunda Maria di Lendah Kulonprogo, beberapa waktu lalu. Namun menurut Verena, per-

gantian jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran organisasi. "Pergantian jabatan merupakan hal yang biasa dalam lingkungan Polri," pungkasnya. **(Ayu)-f**

## Sambungan hal 1

## Gempa

Beberapa hari sebelumnya sempat terjadi gempa kecil yang tidak membuat panik warga, berbeda dengan gempa siang kemarin yang cukup kencang sehingga kepanikan warga sempat terlihat di sejumlah kecamatan terutama di wilayah Cugenang dan Desa Nagrak.

Beberapa warga korban gempa di Desa Benjod, Kecamatan Cugenang mengatakan, getaran gempa yang cukup kencang itu membuat warga bertahan di dalam tenda dan hunian darurat karena di luar hujan lebat, termasuk warga yang sudah kembali rumah hanya bisa bertahan di teras rumah.

Sekretaris BPBD Cianjur Rudi Wibowo mengatakan, gempa Magnitudo 4 terletak pada koordinat 6.84 Lintang Selatan dan 107.08 Bujur Timur, tepatnya berlokasi di

darat pada jarak 6 kilometer Barat Daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 kilometer. "Kami masih menunggu pendataan petugas terkait kerusakan yang disebabkan gempa Magnitudo 4. Untuk getaran gempa cukup dirasakan kencang di sejumlah kecamatan di Utara, Timur dan pusat Kota Cianjur," katanya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat selama empat bulan terakhir 534 gempa susulan terjadi di Kabupaten Cianjur, akibat aktivitas sesar Cugenang, termasuk gempa yang dirasakan warga pada Rabu (29/3) 2023 berkekuatan Magnitudo 4.0.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, gempa ini disebabkan aktivitas Sesar

Cugenang yang sudah ratusan kali terjadi namun kali ini terjadi siang hari dengan getaran cukup kencang. "Memerhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Cugenang, saat terjadi gempa terdengar gemuruh yang disebabkan proses pergeseran batuan bawah permukaan," katanya.

la menjelaskan, karena sangat dangkal sehingga terdengar seperti gemuruh atau dentuman yang membuat panik warga yang mendengarnya, sehingga gempa yang terjadi siang hari pukul 12.34 WIB, membuat catatan gempa susulan akibat aktivitas Sesar Cugenang menjadi 534 kali. **(Ant/San)-d**

## Sambungan hal 1

## Disrupsi

Sensor film zaman orba bertujuan mereduksi kritik terhadap pemerintah dengan buaian canda, tubuh perempuan dan cerita mistis.

Memasuki era reformasi tema film semakin bebas beserta tuntutan minimalis sensor dalam proses pemasarannya. Film dalam masa reformasi digunakan sebagai propaganda identitas tokoh politik bahkan kelompok. Namun pada sisi lain kreativitas insan film justru makin meningkat. Kritik sosial dan kritik politik digunakan sebagai alur cerita dalam film era reformasi

Pada era disrupsi sekarang film Indonesia juga menjarah perhatian penonton pada *media on demand* melalui berbagai *platform* aplikasi multimedia, bahkan film baru Indonesia lebih diminati dibanding film impor yang kebanyakan sudah masuk kategori *out of date*. Sayangnya, tema yang dimunculkan justru kebanyakan adalah pengulangan kisah percintaan modern yang tidak lagi memperhatikan edukasi, etika serta adab.

Sedikit sekali sineas Indonesia memproduksi film dengan semangat nasionalisme atau menyadarkan rasa kebangsaan pada masyarakat terutama kalangan *digital native* yang terlihat mulai jauh dari sejarah bangsa. Film dengan adegan vulgar bertebaran dalam persembuyan *media on demand* sehingga sering luput dari pandangan publik. UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman Indonesia seolah tak dapat membendung pelanggaran yang tidak sesuai dengan pelajaran kekerasan, pomografi, dan nilai-nilai keagamaan serta budaya.

Kondisi film Indonesia yang beredar saat ini meski memiliki kreativitas dalam berbagai tema. Namun beberapa permisif terhadap kemampuannya dalam menyampaikan pesan moral, pesan kebangsaan serta jati diri bangsa. Bahkan menonjol karakter yang harusnya menjadi tokoh panutan kadang ditempel adegan imajiner yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Meskipun saat dalam 'bum-

bu' skenario namun semangat *mikul dhuwur dan mendhem jero* dalam konteks normatif sudah menghilang.

Momentum Hari Film Nasional ini seharusnya mulai dijawab pemerintah khususnya pihak lembaga sensor untuk menyikapi agar tidak menjerumuskan perkembangan moral dan kepribadian masyarakat ke arah yang tidak Pancasila. Bahkan bertawan dengan adat dan norma sosial bangsa yang lebih menekankan pada penyampaian pesan yang santun dan berpegang teguh pada adat yang mulia. Peredaran film khusus dalam *media on demand* seharusnya lebih serius dalam pengawasannya. Karena penawaran yang masif yang terus disusupi oleh sineas yang 'takut' terhadap peredaran film dalam ranah publik. Kiblat film yang telah mengindonesia seharusnya lebih dipertahankan tanpa harus menengok kreativitas film dengan ideologi lain. **(Penulis adalah Associate Professor Mikom UPN Veteran Yogyakarta)-d**

## Sambungan hal 1

## Presiden . . . .

### Sambungan hal 1

yang merupakan salah satu partai koalisi Pemerintah telah mendeklarasikan akan mengesung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada Pemilu 2024.

Adapun selain menteri, di Kabinet Indonesia Maju saat ini terdapat sejumlah kursi wakil menteri yang kosong, di antaranya Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Perindustrian, serta Wakil Menteri PUPR. **(Ant/San)-d**

Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023 diubah menjadi 19, 20, 21, 24, 25 April 2023," katanya.

Pertimbangan menggeser tanggal cuti bersama dan menambah satu hari libur cuti bersama, kata Muhadjir, untuk memberi kesempatan masyarakat mengambil cuti lebih awal. "Dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan dari penumpukan massa pada puncak mudik yang waktunya diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 2023 yakni pada 21 April 2023," katanya. **(Ant/Ati)-d**

## Sambungan hal 1

## Cuti



Prakiraan Cuaca		Kamis, 30 Maret 2023				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	23-30	75-95
Wates	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-30	70-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95

# 4 Perubahan Perilaku Masyarakat Ekonomi Bawah Dampak Digitalisasi

Beberapa dampak teknologi digital pada perilaku masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah dirangkum sebagai berikut.

- Ketergantungan pada teknologi digital**  
Peningkatan penggunaan teknologi digital seperti smartphone, internet, dan media sosial telah membuat masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah semakin tergantung pada teknologi ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Indonesian Internet Service Providers Association (APJII), pada tahun 2020 terdapat 196,7 juta pengguna internet di Indonesia, dan sekitar 90% pengguna internet adalah dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. (Sumber: APJII, 2020)
- Perubahan pola interaksi sosial**  
Peningkatan penggunaan teknologi digital juga telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak orang sekarang lebih memilih untuk berkomunikasi melalui media sosial atau aplikasi pesan daripada bertemu langsung dengan orang lain. Menurut survei yang dilakukan oleh We Are Social dan Hootsuite, pada tahun 2021 sekitar 61% penduduk Indonesia menggunakan media sosial, dan sekitar 88% dari mereka mengakses media sosial melalui smartphone. (Sumber: We Are Social dan Hootsuite, 2021)
- Perubahan gaya hidup**  
Peningkatan penggunaan teknologi digital juga telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak orang sekarang lebih memilih untuk menonton film dan acara televisi melalui layanan streaming daripada menonton televisi konvensional. Menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2020, sekitar 70% konsumen di Indonesia membeli barang melalui platform e-commerce, dan sekitar 64% di antaranya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. (Sumber: Nielsen, 2020)
- Kesenjangan digital**  
Namun, dampak teknologi digital pada perilaku masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah tidak selalu positif. Masih terdapat kesenjangan digital yang cukup signifikan antara masyarakat kelas menengah ke bawah dengan kelas menengah ke atas dalam akses, keterampilan, dan penggunaan teknologi digital. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, hanya sekitar 14,9% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses internet dengan kecepatan di atas 10Mbps, dan mayoritas dari mereka berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas. (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019)

Lalu bagaimana peran tokoh agama dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak dari digitalisasi? Dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak dari digitalisasi, tokoh agama dapat memainkan peran yang penting. Mereka dapat membantu masyarakat memahami dampak positif dan negatif dari teknologi digital, memberikan orientasi nilai, memberikan inspirasi dan motivasi, serta membantu masyarakat agar tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi digital. Namun, peran tokoh agama juga perlu dijalankan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik atau perpecahan di antara pengikut agama.

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara spesifik membahas tentang dampak teknologi digital terhadap perilaku masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, namun terdapat beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan nilai dan prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks ini. Salah satu diantaranya Q.S. Al Hujurat ayat 6, ayat ini mengajarkan pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan berpikir kritis dalam memproses informasi yang diterima dari media sosial dan teknologi digital.

**ARIF AKBARUL HUDA, SSI MEng**  
Dosen Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta

**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**  
Creative Economy Park